

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian di Indonesia dalam hal perkembangan dan kemajuan ekonomi peran akuntan sangatlah dibutuhkan karena ilmu akuntansi penting untuk melaksanakan proses kegiatan perusahaan yang tidak menimbulkan kerugian, kecurigaan, ataupun penyalahgunaan ekonomi khususnya dalam bidang keuangan. Informasi keuangan sangatlah penting bagi suatu entitas atau perusahaan dimana informasi tersebut diberitahukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam jalannya suatu entitas atau perusahaan untuk mengetahui bagaimana isi dari suatu laporan keuangan di perusahaan guna meningkatkan dan pengambilan keputusan yang menjadi dasar suatu laporan keuangan perusahaan.

Di Indonesia dalam sistem ekonomi kerakyatan dikenal tiga pelaku ekonomi yang menjadi pilar utama perekonomian yaitu Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Salah satu pelaku ekonomi yang menjadi peran penting dalam sistem ekonomi di Indonesia adalah Koperasi, dimana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah:

“ koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

University

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa koperasi di Indonesia merupakan organisasi perorangan dimana dimulai dengan ekonomi yang mendasar yang bisa di dirikan oleh siapa saja dengan persamaan ekonomi dan tujuan yang sama dengan asas kekeluargaan sehingga saling bergotong royong untuk mensejahterakan perekonomian di indonesia dan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Perkembangan koperasi di Indonesia menurut kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM), menegaskan bahwa pemberdayaan dan pengembangan koperasi di indonesia saat ini telah berjalan sesuai dengan *roadmap* atau peta jalan yang di tetapkan sampai dengan 2024. Pengembangan koperasi menurut Naution (2008:25) yaitu:

“Pengembangan koperasi dapat dijadikan sebagai sebuah wahana yang efektif bagi anggota untuk saling bekerjasama, membuka akses pasar, modal, informasi, teknologi dengan mengoptimalkan potensi, dan memanfaatkan peluang usaha yang terbuka”.

Di Indonesia ada beberapa kategori Koperasi yang di bagi menjadi beberapa macam atau bidang koperasi dengan peranan dan tujuan yang berbeda tetapi satu tujuan yang sama yaitu dengan dengan mengedepankan semangat gotong royong dari sesama anggota, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa jenis-jenis koperasi yaitu koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sector usaha diantaranya: (a) koperasi simpan pinjam, (b) koperasi konsumen, (c) koperasi produsen, (d) koperasi pemasaran, dan (e) koperasi jasa.

Koperasi produsen adalah salah satu dari jenis koperasi yang bertujuan menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri, dimana Menurut Rudianto (2010;108), menyatakan bahwa pengertian koperasi produsen adalah:

“Koperasi produsen adalah koperasi yang membeli bahan baku, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap dipakai, dan menjualnya kepada konsumen yang membutuhkannya”.

Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kota Bandung merupakan koperasi produsen yang merupakan salah satu koperasi produsen di Kota Bandung. Yang mempunyai tiga jenis usaha yaitu usaha perdagangan kedelai, usaha perdagangan non kedelai, dan usaha simpan pinjam. Semua unit usaha ini merupakan bentuk pelayanan koperasi kepada anggotanya sesuai dengan tujuan koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pada sebuah organisasi atau perusahaan ketika menjalankan suatu kegiatan usahanya akan berusaha untuk mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk mencapai tujuan perusahaan dengan maksimal, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka Panjang. salah satu faktor yang mempengaruhi tujuan perusahaan yaitu adalah sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, entitas dan lembaga baik berupa hak kuasa atau benda yang diperoleh dari masa lampau dan memberikan manfaat di masa mendatang. Salah satu sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yaitu asset tetap, dimana tanpa adanya asset

dalam sebuah entitas, perusahaan dan Lembaga tidak akan beroperasi dengan baik karena asset memiliki peran penting dalam perusahaan.

Pada sebuah perusahaan ataupun koperasi dalam melaksanakan kegiatan operasinya pasti memerlukan berbagai peralatan, perlengkapan, sarana maupun prasarana lainnya untuk menunjang dalam kegiatan usahanya demi terwujud tujuan perusahaan yang di haarpkan dalam menjalankan kegiatannya, maka dalam istilah akuntansi disebut dengan aktiva tetap atau aktiva berwujud yang diperoleh siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan dan memiliki masa manfaat dalam jangka waktu satu periode akuntansi.

Aktiva tetap merupakan salah satu sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan dimana tanpa adanya asset dalam sebuah entitas, perusahaan dan Lembaga tidak akan beroperasi dengan baik karena asset memiliki peran penting dalam perusahaan. Menurut rudianto (2010:174) aset tetap adalah:

“aset tetap adalah barang berwujud milik koperasi yang sifatnya relative permanen dan digunakan dalam kegiatan normal koperasi, bukan untuk diperjualbelikan”

Aset tetap pada dasarnya bisa memberikan gambaran kapitalisasi yang wajar, oleh karena itu dibutuhkan adanya perlakuan akuntansi yang memadai mulai saat perolehan sampai dengan saat pengalokasian biaya selama umur aset tetap tersebut (Rizka,Sri;2019). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013:ETAP,49), Perlakuan akuntansi atas aset tetap meliputi pengakuan, biaya perolehan aset tetap, perolehan aset tetap, penyusutan atau depresiasi aset tetap tersebut, dan bagaimana penyajian aset tetap dalam laporan keuangan.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap aliran kas dan setara kas kepada koperasi. Arus kas tersebut dapat terjadi melalui penggunaan aset atau pelepasan kepemilikan aset. Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Umkm Republik Indonesia No.12/Per/M.UMKM/IX/2015 ketentuan umum akuntansi aset: (1) Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjulankan operasional usaha; (2) Aset merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh koperasi; (3) Aset yang diperoleh dari sumbangan (hibah), yang tidak terikat penggunaannya, diakui sebagai aset lancar.

Sehubungan dengan pentingnya laporan keuangan bagi suatu entitas, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Bagi perusahaan yang berskala kecil atau yang tidak terdaftar di pasar modal dan tidak memiliki akuntabilitas SAK umum, maka untuk menyusun laporan keuangan menggunakan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) yang berlaku efektif per 1 Januari 2011, (Sari;2020).

Dalam sebuah perusahaan baik itu koperasi dalam menyusun laporan keuangan harus benar-benar disesuaikan dengan standar besar kecilnya jumlah aset yang ada di neraca yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan dan selanjutnya akan mempengaruhi para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan oleh karena itu, untuk memperoleh kewajaran dan penyajian jumlah aset tetap dalam laporan keuangan, perusahaan perlu menetapkan dan menerapkan kebijakan

akuntansi aset tetap dengan berpedoman dengan prinsip yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik khususnya nomor 15 tahun 2009 tentang aset tetap dan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi Dan UMKM Republik Indonesia No.12/Per/M.UMKM/IX/2015.

Hak kepemilikan merupakan bagian penting dalam sebuah entitas dan menjadi bagian penting dalam aset tetap, maka harus diatur sedemikian supaya sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti yang dijelaskan Peraturan Menteri Koperasi Dan Umkm Republik Indonesia No.12/Per/M.UMKM/IX/2015 bahwa hak milik harus atas nama badan hukum koperasi.

Penanganan aset tetap bertujuan untuk memperoleh efisiensi pengamanan terhadap aset tetap agar dana yang di investasikan kedalam aset tetap memperoleh manfaat yang maksimum sesuai dengan jangka waktu pemakaiannya, serta untuk menghindari ketidak wajaran pelaporan biaya dalam suatu periode akuntansi. Aset tetap juga erat kaitannya dengan umur ekonomis dari aset tersebut sehingga perusahaan perlu menerapkan suatu sistem informasi akuntansi aset tetap untuk dapat mengestimasi secara akurat umur ekonomis aset tetap tersebut. Hal ini sangat penting karena dengan estimasi umur yang akurat, perusahaan dapat mentaksir masa pengguna aset tetap tersebut secara lebih efektif.

Alasan peneliti melakukan penelitian di KOPTI Kota Bandung karena: (1) penulis ingin melihat pemeliharaan aset tetapnya. (2) penulis ingin mengetahui bagaimana perlakuan aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Umkm Republik Indonesia No.12/Per/M.UMKM/IX/2015.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk bisa mengetahui nilai aset tetap atau harta di KOPTI Kota Bandung dan mengetahui nilai aset yang dimiliki anggota dari KOPTI Kota Bandung berapa banyak dengan mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Umkm Republik Indonesia No.12/Per/M.UMKM/IX/2015.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik meneliti mengenai bagaimana penerapan akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan khususnya di koperasi produsen tempe tahu kota bandung, yang kemudian akan dibandingkan antara kebijakan perlakuan akuntansi yang ditetapkan diperusahaan dengan kebijakan akuntansi yang tetapkan dalam standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, serta menyimpulkan hasil penelitian ini dalam laporan yang berjudul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Umkm Republik Indonesia No.12/Per/M.Umkm/Ix/2015 Pada Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia Kota Bandung”**



1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap di Koperasi Produsen Tempe Tahu Kota Bandung.
2. Apakah perlakuan akuntansi aset tetap di Koperasi Produsen Tempe Tahu Kota Bandung sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Umkm Republik Indonesia No.12/Per/M.UMKM/IX/2015.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap terhadap koperasi produsen tempe tahu kota bandung berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Umkm Republik Indonesia No.12/Per/M.UMKM/IX/2015

1.3.2 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perlakuan akuntansi aset tetap di Koperasi Produsen Tempe Tahu Kota Bandung.
2. Kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap di Koperasi Produsen Tempe Tahu Kota Bandung dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Umkm Republik Indonesia No.12/Per/M.UMKM/IX/2015.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai akuntansi keuangan khususnya yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi terhadap asset tetap yang ada kaitannya dengan laporan keuangan.

1.4.1 Aspek Teoritis

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan aspek pengembangan dalam ilmu akuntansi keuangan dan dapat bermanfaat bagi ilmu akuntansi koperasi.
2. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi penelitian dimasa mendatang.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Bagi koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi koperasi sebagai masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan dimasmendatang.

2. Bagi Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat berguna bagi civitas akademik Institut Manajemen Koperasi Indonesia, khususnya mahasiswa yang merupakan calon pemimpin masa depan dalam bidang ekonomi dan koperasi.

Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi pembangunan koperasi kedepan yang dapat mensejahterakan bangsa Indonesia dan ikut serta dalam kostibusi penuh dalam peningkatan perekonomian Indonesia di masa mendatang.